

Studi Implementasi *E-Government* di Daerah Perbatasan

The Study of E-Government Implementation in Border Area

¹⁾Riva'atul Adaniah Wahab, ²⁾Arsyad

^{1,2}Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Manado

^{1,2}Jl. Pomorow No. 76, Manado, 95127, Telp/Fax: 0431-858268

¹⁾riva002@kominfo.go.id, ²⁾arsyad@kominfo.go.id

Diterima: 24 Januari 2015 || Revisi: 9 April 2015 || Disetujui: 14 April 2015

Abstrak – Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara tidak langsung berdampak pada perkembangan implementasi *e-government* di masing-masing pemerintah daerah. Otoritas untuk menentukan konsep *e-government* menjadikan masing-masing daerah memiliki tingkat kemajuan implementasi *e-government* yang berbeda. Kesenjangan pada umumnya rentan terlihat di daerah perbatasan. Seiring dengan permasalahan tersebut, tuntutan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan di semua bidang datang bertubi-tubi. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dewasa ini semakin menguat. Dalam hal ini, penguatan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah solusinya. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan berdampak pada pelayanan publik yang lebih baik sebagai salah satu wujud *good governance*. Karenanya, penelitian implementasi *e-government* perlu dilakukan di daerah perbatasan dalam rangka mendorong pemerataan implementasi *e-government* di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus deskriptif dengan wawancara terbuka sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi *e-government* di Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai salah satu daerah perbatasan di Indonesia, khususnya konsep G2G. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi G2G *e-government* di Kabupaten Kepulauan Talaud masih berada pada tahap 1 yaitu persiapan. Proses dalam implementasinya pun masih dilakukan secara parsial atau sektoral di masing-masing SKPD. Dalam kondisi ini, model *connected government* dapat diterapkan sebagai solusinya.

Kata Kunci: *e-government*, daerah perbatasan, implementasi *e-government*, Kabupaten Kepulauan Talaud.

Abstract – The policies of decentralization and regional autonomy indirectly give an impact on the development of *e-government* implementation in each local governments. The authority to determine the concept of *e-government* makes each region has different level of progress in implementation of *e-government*. Generally, gap looks vulnerable in the border areas. Along with this problem, the public demands on the quality of governance in all areas come repeatedly. Those show that today the challenges facing local government more intensify. In this case, the strengthening of local government accomplishment is the solution. Good governance will trigger a better performance in public services as a manifestation of good governance. Hence, a research of the *e-government* implementation needs to be done in the border area in order to encourage the implementation of *e-government* equity in all regions of Indonesia, especially for G2G concept. This study uses a qualitative approach with a descriptive case study and open interview as one of data collection techniques. One of the aims is to study the implementation of *e-government* in Talaud Archipelago Regency as one of the border areas in Indonesia. The results show that the G2G *e-government* implementation in Talaud Archipelago Regency still occupy the first stage, preparation level. Furthermore, the processes in the implementation are still done partially or sectoral in each SKPD. In this condition, the *connected government* model can be applied as a solution.

Keywords: *e-government*, border areas, *e-government* implementation, Talaud Archipelago Regency.

PENDAHULUAN

Isu *good governance* semakin berkembang di era reformasi seiring dengan silih bergantinya tonggak kepemimpinan pemerintahan dan semakin terbukanya ruang demokrasi yang memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara konseptual, kata *good* dalam *good governance* mengandung pemahaman aspek fungsional dari

pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya. Paradigma *good governance* menegaskan pentingnya kesetaraan, kesinergian, dan kerjasama hubungan antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sipil (Damayanti & Hamzah, 2010: 1-4). Definisi tersebut mengarahkan hakekat *good governance* sebagai suatu konsep tentang penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan banyak pihak (*stakeholders*) yang mengandung makna

sharing/partnership pengelolaan negara antarsektor publik yaitu negara/pemerintah, swasta/dunia usaha, dan masyarakat yang disebut pilar-pilar *good governance* (Jumiati, 2010: 57).

Sejalan dengan berkembangnya isu *good governance*, revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berpengaruh secara masif dan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terbukanya akses informasi serta perkembangan TIK mendorong masyarakat dan pihak swasta lebih memfokuskan perhatiannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akses masyarakat dan pihak swasta terhadap kinerja dan informasi pemerintahan kini menjadi suatu fenomena yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia (Retnowati, 2012: 54-55). Dampaknya, pemerintah dituntut untuk memperbaiki kinerjanya mengingat masyarakat dan pihak swasta telah terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Perbaikan kinerja birokrasi atau reformasi birokrasi telah menjadi sebuah keharusan untuk dapat memberikan performansi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Dalam upaya ini, informasi yang cepat dan akurat semakin menjadi kebutuhan pokok para pengambil keputusan (*decision maker*). Kebutuhan akan informasi tersebut dapat diakses menggunakan TIK sehingga menjadikannya sebagai komoditi penting dan katalisator untuk mewujudkan *good governance*. Menurut Fadhli (2010), dalam era teknologi penggunaan TIK diklaim dapat mempercepat proses pembangunan dengan menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global, dan transparansi (Fadhli, 2010: 1-2). Realita yang ada menunjukkan bahwa TIK telah mulai diadopsi dan diadaptasi sehingga dapat digunakan serta dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah lebih dikenal dengan *electronic government (e-government)*, juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government*, atau konteks tertentu *transformational government*.

PBB mendefinisikan *e-gov* sebagai penggunaan TIK dan penerapannya oleh pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan publik ke masyarakat (Hermana, 2012), yang menurut Indrajit (2005) bertujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan publik secara efektif, efisien, dan terbuka (Yohana & Yazid, 2013: 3). *E-gov* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik,

untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Dalam pengertian *e-gov* ada dua hal utama yang perlu digarisbawahi, pertama adalah penggunaan TIK sebagai alat bantu dan kedua adalah tujuan pemanfaatannya untuk efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Efendi dalam Akadun (2009) menyatakan bahwa untuk membangun pemerintah daerah yang *good governance* perlu dibangun jaringan kerjasama didasarkan atas hubungan (*linkage*) yang partisipatif, transparan, dan responsif antar pilar-pilar *good governance*. Hubungan semacam itu hanya dapat dibangun dengan menerapkan *e-gov* (Mardhayati, 2012: 162). Dalam pandangan umum, *e-gov* sejauh ini masih dipahami sebatas pembuatan situs *website* pemerintah. Padahal secara luas pemanfaatan TIK dalam pemerintahan bisa berbeda-beda berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi *e-government* akan mentransformasi tatanan birokrasi yang kaku menjadi kompleks dan dinamis guna memfasilitasi berbagai bentuk interaksi dengan pihak lain. Dalam proses ini, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan TIK untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses kesemua informasi dan layanan publik yang harus disediakan.

Keseriusan pemerintah dalam mendukung implementasi *e-gov* jelas tercantum dalam Intruksi Presiden No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Secara tegas, Inpres ini merumuskan maksud implementasi *e-gov* yaitu untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Karenanya pengembangan *e-gov* diarahkan untuk mencapai 4 tujuan yaitu Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat; Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional;

Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara; Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antarlembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom (Presiden Republik Indonesia, 2003).

Para pakar memiliki rumusan yang berbeda-beda dalam menentukan tahapan-tahapan *e-gov*. Di Indonesia sendiri, proses penerapan pengembangan *e-gov* dalam Inpres No. 3/2003 berada pada butir strategi keenam dengan tahapan sistematis yaitu Tingkat 1 – Persiapan, meliputi pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana akses yang mudah misalnya *Multipurpose Community Center* dan Warnet; sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik; Tingkat 2 – Pematangan, meliputi pembuatan situs informasi publik interaktif dan antarmuka keterhubungan dengan lembaga lain; Tingkat 3 – Pemantapan, meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik dan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain, dan Tingkat 4 – Pemanfaatan, meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi (Presiden Republik Indonesia, 2003).

Sejak Inpres No. 3/2003 diterbitkan, pemerintah Indonesia secara bertahap melakukan transformasi penyelenggaraan pemerintah. Namun, harus diakui bahwa proses tersebut memerlukan waktu yang cukup lama karena mencakup berbagai sub proses diantaranya penganggaran, penyediaan sarana prasarana, serta SDM untuk menjamin kesiapan semua elemen dalam implementasi *e-gov*. Implementasi *e-gov* di negara anggota PBB tiap tahunnya diukur melalui Indeks Pengembangan *E-Gov* atau *E-Gov Development Indeks* (EGDI) yang telah dikembangkan sejak 2003. Indeks ini memiliki indikator pengukuran yang berbeda tiap tahunnya tergantung dari perkembangan TIK. Berdasarkan survei PBB 2012, Indonesia menempati posisi ke-97 dunia dengan nilai EGDI 0,4949. Nilai ini sudah menunjukkan perkembangan dari nilai EGDI 2010 sebesar 0,4877 yang menempati ranking ke 109 dari 122 negara. Namun di wilayah ASEAN, Indonesia masih menempati posisi ketujuh dan cenderung menurun dari 2003 sampai 2010 sebelum naik lagi di 2012 (Hermana, 2012). Adapun *The 2013 Waseda*

University International e-Government Ranking menempatkan Indonesia pada urutan 40 dari 55 negara dengan nilai 53,05 (Waseda University, 2013: 3).

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara tidak langsung berdampak pada perkembangan implementasi *e-gov* di masing-masing pemerintah daerah. Otoritas untuk menentukan konsep *e-gov* berdasarkan Inpres No. 3/2003 menjadikan masing-masing daerah memiliki tingkat kemajuan implementasi *e-gov* yang berbeda. Kesenjangan pada umumnya rentan terlihat di daerah perbatasan. Di satu sisi, beberapa pemerintahan daerah kota/kabupaten sudah sangat maju dalam implementasi *e-gov*. Ironisnya, di sisi lain, beberapa pemerintahan daerah perbatasan bahkan baru memulai implementasinya karena keterbatasan yang dimiliki, misalnya sarana dan prasarana serta kualitas SDM (Manurung, 2011). Wilayah perbatasan, terutama yang terdiri dari gugusan pulau-pulau, pada umumnya identik dengan karakteristik ketertinggalan dan keterisolasian. Kondisi tersebut tidak hanya dibuktikan dengan letak geografisnya tetapi juga pada keterbatasan sarana dan prasarana vital dalam rangka menggerakkan roda perekonomian. Secara garis besar, salah satu isu yang muncul seputar daerah perbatasan adalah pengelolaan pembangunan (Faizan, 2006: 23). Asisten Deputi Urusan Daerah Perbatasan Tahun 2011 mencatat kurangnya akses dan media komunikasi serta informasi dalam negeri sebagai salah satu permasalahan daerah perbatasan pada level nasional (Manurung, 2011). Fungsinya sebagai salah satu beranda depan NKRI, menjadikan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika di daerah perbatasan merupakan suatu keharusan dan sangat vital dalam rangka menyediakan akses informasi yang cepat dan benar kepada masyarakat. Kesenjangan informasi dapat berpotensi menyebabkan konflik kemasyarakatan maupun kenegaraan. Adopsi penggunaan dan pemanfaatan TIK harus dimulai dari pemerintah daerah sebagai *leader* penggerak perekonomian di segala bidang. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan di semua bidang datang bertubi-tubi. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dewasa ini semakin menguat. Dalam hal ini, penguatan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah solusinya (Faizan, 2006: 29). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan berdampak pada pelayanan publik yang lebih baik sebagai salah satu wujud *good governance* (BPS Kabupaten Kepulauan

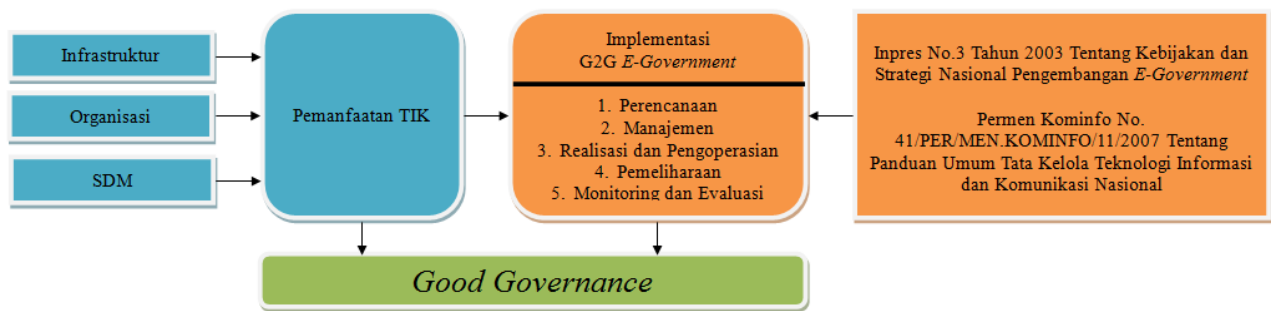
Talud, 2012: 3-8). Oleh karena itu, penelitian implementasi *e-gov* perlu dilakukan di daerah perbatasan dalam rangka mendorong pemerataan implementasi *e-gov* di seluruh wilayah Indonesia agar dapat meningkatkan nilai EGDI nasional Indonesia.

Sejak diterbitkannya Inpres No. 3/2003, kajian terkait *e-gov* mulai banyak dilakukan. Tahun 2010, Harimurti meneliti pengelolaan teknologi informasi di pemerintahan (Harimurti, 2010: 85). Tahun 2011, Danu Hariadi juga melakukan penelitian *e-gov* dengan fokus pengaruh investasi implementasi *e-gov* terhadap pelayanan kependudukan, investasi swasta, dan PDRB di Kabupaten Sragen. Hasilnya menunjukkan bahwa investasi implementasi *e-gov* berpengaruh positif terhadap pelayanan kependudukan, investasi swasta, dan PDRB di Kabupaten Sragen (Hariadi, 2011: vi). Tahun 2012, Mardhayati menganalisis perencanaan pengembangan *e-gov* untuk pelayanan publik di Kota Solok. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan *e-gov* di Kota Solok merupakan perencanaan yang *top down* dalam bentuk *Masterplan* Pengembangan Sistem *e-Gov* Pemerintah Kota Solok Tahun 2010-2014. Namun, *masterplan* belum sesuai dengan peta tahapan yang telah dibuat (Mardhayati, 2012). Penelitian-penelitian sebelumnya dominan terfokus pada perencanaan dan implementasi terhadap berbagai bidang pemerintahan dalam konteks G2C dan G2B. Adapun fokus yang dibahas dalam penelitian ini yaitu implementasi *e-gov* pada tataran G2G dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi dasar implementasi *e-gov* pada konteks G2C dan G2B yang lebih baik. Lokasi penelitian terdahulu berada di wilayah barat Indonesia dan berbatasan darat dengan provinsi lainnya yang dapat dijangkau melalui jalur darat dari ibukota provinsi. Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah daerah perbatasan di wilayah timur Indonesia yang hanya dapat dijangkau dengan transportasi udara maupun laut. Daerah yang jaringan jalan dan angkutan perhubungan daratnya masih sangat terbatas cenderung mengalami kesulitan dalam pengembangan daerahnya, terutama untuk daerah di wilayah timur Indonesia (Bappenas, 2004: 19-23).

Cakupan *e-gov* sangat luas dimana meliputi *Government-to-Citizen* (G2C), *Government-to-Business* (G2B), dan *Government-to-Government* (G2G). Dalam penelitian ini, masalah yang dibahas

dibatasi pada G2G. Pembatasan ini didasarkan pada pandangan bahwa untuk dapat memberikan pelayanan yang baik ke *stakeholder* lainnya (G2C dan G2B), perbaikan secara internal pemerintahan harus menjadi prioritas. G2G yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi *e-gov* di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun integrasi antar-SKPD. Aspek G2G diadaptasi dari lingkup proses tata kelola TIK meliputi perencanaan, manajemen, realisasi dan pengoperasian sistem, pemeliharaan sistem, serta monitoring dan evaluasi. Pengambilan data dilakukan di salah satu daerah perbatasan Provinsi Sulawesi Utara dalam wilayah kerja Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Manado yaitu Kabupaten Kepulauan Talud. Pembangunan *e-gov* di daerah ini dipandang urgen untuk dilakukan melihat Kabupaten Kep. Talud merupakan kabupaten terluar (paling dekat dengan negara tetangga) dari tiga gugusan kabupaten kepulauan (Kabupaten Kep. Sitaro, Kabupaten Kep. Sangihe, dan Kabupaten Kep. Talud) di perbatasan Provinsi Sulawesi Utara. Karakteristik yang cenderung terisolasi dari aspek geografis (disebabkan keterbatasan akses transportasi) dan kesulitan dalam pengembangan daerah menjadikan penelitian dengan fokus dan lokus ini dirasa sangat menarik dan penting.

Berdasarkan latar belakang penelitian maka masalah yang dikaji dalam dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi G2G *e-gov* di Kabupaten Kep. Talud? Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi G2G *e-gov* di Kabupaten Kep. Talud. Implementasi yang dimaksud juga termasuk faktor pendukung dan penghambat serta model implementasi *e-gov* yang dapat diterapkan di Kabupaten Kep. Talud. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain bagi Kemkominfo khususnya Direktorat *E-Government*-Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) agar dapat mengetahui perkembangan implementasi *e-gov* oleh pemerintah daerah perbatasan, khususnya konsep G2G. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi model implementasi G2G *e-gov* di pemerintah daerah perbatasan. Adapun konsep penelitian yang digunakan dapat dilihat melalui Gambar 1.



Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

Pemanfaatan TIK memiliki kontribusi dalam rangka mewujudkan *good governance* di Kabupaten Kep. Talaud. Pemanfaatan TIK secara maksimal bergantung pada ketersediaan infrastruktur, kepemimpinan dalam organisasi, dan SDM yang mumpuni dalam penggunaannya. Implementasi G2G *e-gov* di Kabupaten Kep. Talaud diharapkan dapat mendorong terwujudnya *good governance* di daerah tersebut. Aspek implementasi G2G *e-gov* yang dikaji mengacu pada Inpres No.3/2003 dan Permen Kominfo No. 41/2007 dalam penelitian ini yaitu:

1. Perencanaan: Proses ini berkaitan dengan identifikasi kebutuhan dan formulasi inisiatif-inisiatif *e-gov* sebagai landasan implementasi untuk memastikan bahwa rencana *e-gov* di semua level SKPD Kabupaten Kep. Talaud sinergis dan konvergen dengan rencana skala nasional sampai ke level paling bawah.
2. Manajemen: Proses ini berkaitan dengan pengelolaan *e-gov* di masing-masing SKPD Kabupaten Kep. Talaud meliputi manajemen belanja/anggaran, organisasi, dan SDM.
3. Realisasi dan pengoperasian sistem: Proses ini berkaitan dengan pemilihan, penetapan, pengembangan/akuisis sistem, serta manajemen proyek *e-gov* di masing-masing SKPD Kabupaten Kep. Talaud. Sedangkan pengoperasian terkait dengan operasional *e-gov* masing-masing SKPD Kabupaten Kep. Talaud untuk memberikan jaminan tingkat layanan dan keamanan sistem yang dioperasikan.
4. Pemeliharaan sistem: Proses ini berkaitan dengan pemeliharaan aset-aset *e-gov* untuk mendukung pengoperasian sistem yang optimal di masing-masing SKPD Kabupaten Kep. Talaud.
5. Monitoring dan evaluasi: Proses ini berkaitan dengan monitoring dan evaluasi semua aspek maupun proses *e-gov* di masing-masing SKPD Kabupaten Kep. Talaud. Proses ini dibutuhkan

dibutuhkan untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan (*continues improvement*).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau naturalistik karena dilakukan pada tempat atau kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan peneliti tidak membuat perlakuan. Pendekatan ini juga disebut metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data lapangan serta data yang terkumpul (Sugiyono, 2012: 7-8). Pendekatan kualitatif sesuai digunakan jika tujuan utama dari studi adalah menggambarkan situasi, fenomena, permasalahan, atau kejadian (Widi, 2010: 57).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif studi kasus. Umumnya teknik penelitian ini digunakan untuk pembuatan rencana dan pengambilan keputusan. Teknik deskriptif juga digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang proses yang sedang berlangsung. Dengan menggunakan teknik penelitian ini, peneliti menghimpun informasi, data, atau fakta terkini mengenai implementasi *e-gov* di daerah perbatasan khususnya di Kabupaten Kep. Talaud. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh gambaran secara sistematis proses implementasi *e-gov* yang sedang berlangsung di daerah tersebut dengan tujuan melalui gambaran yang diperoleh dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan konsep atau pengambilan keputusan terkait kebijakan *e-gov* di Kabupaten Kep. Talaud (Widi, 2010: 47-52).

Data primer penelitian bersumber dari hasil pengamatan langsung dan wawancara dengan informan penelitian. Adapun data sekunder bersumber dari literatur-literatur ilmiah seperti buku, hasil penelitian, majalah, artikel, dokumen, jurnal ilmiah, dan sumber literatur lainnya yang terkait dengan fokus penelitian. Data penelitian diperoleh dengan

menggunakan teknik pengumpulan data yaitu terdiri dari 1) Wawancara terbuka, dimana peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan kepada informan mengenai implementasi *e-gov* di Kabupaten Kep. Talaud (Sugiyono, 2012: 140), 2) Observasi, dimana peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung mengenai implementasi *e-gov* di Kabupaten Kep. Talaud. Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai pengamat non-partisipatif yang tidak terlibat langsung dalam implementasi *e-gov* di Kabupaten Kep. Talaud (Sugiyono, 2012: 145), 3) Studi Dokumentasi melalui studi sumber-sumber tertulis atau dokumen implementasi *e-gov* khususnya di Indonesia, daerah-daerah lain, maupun di luar negeri, baik yang diperoleh sendiri maupun diperoleh dari informan penelitian yang dapat dijadikan referensi. Informan dalam penelitian ini diperoleh melalui gabungan teknik *snowball* dan *purposive sampling* berdasarkan fokus serta tujuan penelitian. Karena fokus implementasi adalah G2G maka informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah pejabat di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Kep. Talaud yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi yaitu Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Umum dan Kepegawaian BAPPEDA, Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Penetapan DPPKAD, Kabid Kominfo Dishubkominfo, Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan dan Infrastruktur Sekretariat Daerah (Setda), Kabag Humas Setda, Kabid Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil), Sekretaris Badan (Sekda) Litbang Daerah (Litbangda), dan pengelola *provider* Internet di Kabupaten Kepulauan Talaud CV. Porodisa Net. Dalam pengumpulan data, peneliti berperan sebagai instrumen penelitian yang memilih informan penelitian sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, penilaian kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuan penelitian (Sugiyono, 2012: 305-306). Adapun alat bantu yang digunakan antara lain panduan wawancara, alat rekam, dan kamera.

Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga tahap yaitu sebelum memasuki lokasi penelitian, selama di lokasi penelitian, dan setelah selesai di lokasi penelitian. Analisis data sebelum memasuki lokasi penelitian dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Pada tahapan awal analisis data, literatur terkait dengan model-model implementasi *e-gov* di daerah lain maupun di

negara lain mengarahkan peneliti untuk fokus kepada implementasi *e-gov* di Kabupaten Kep. Talaud dijadikan referensi untuk mendukung proses persiapan pengumpulan data di lapangan. Analisis data pada saat pengumpulan data dilakukan peneliti pada saat wawancara dimana peneliti melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai (Sugiyono, 2012: 245-246). Dalam penelitian ini, pertanyaan yang diajukan adalah terkait dengan implementasi *e-gov* di Kabupaten Kep. Talaud. Dalam proses wawancara, peneliti menemukan adanya keterlibatan beberapa instansi dalam implementasi *e-gov* di Kabupaten Kep. Talaud sehingga untuk mendapatkan data yang kredibel perlu untuk melakukan wawancara dengan pihak-pihak tersebut (*snowball*). Analisis setelah pengumpulan data menggunakan Model Miles dan Huberman dimana data kualitatif dianalisis secara interaktif. Adapun aktivitas dalam analisis data model ini terdiri dari 1) Penyederhanaan data/*data reduction*. Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan implementasi *e-gov* di Kabupaten Kep. Talaud meliputi perencanaan, manajemen, realisasi dan pengoperasian, pemeliharaan, sampai pada monitoring dan evaluasinya. 2) Penyajian data/*data display*. Data disajikan dalam bentuk teks naratif implementasi *e-gov* di Kabupaten Kep. Talaud. 3) Pengambilan kesimpulan/*conclusion drawing* dan verifikasi/*verification*. Data yang diperoleh difokuskan untuk menjawab rumusan masalah terkait implementasi *e-gov* di Kabupaten Kep. Talaud, faktor pendukung dan penghambat, serta menemukan model G2G *e-gov* yang dapat diterapkan di Kabupaten Kep. Talaud (Sugiyono, 2012: 246-253).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi G2G *E-Government* di Kabupaten Kepulauan Talaud Saat Ini

Perencanaan Sistem

Umumnya, perencanaan implementasi program pemerintahan dituangkan dalam bentuk regulasi kebijakan, rencana induk (renduk), *masterplan*, atau *blueprint* (Pemerintah Kabupaten Demak, 2010: 132). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian BAPPEDA, Kabag Pembangunan dan Infrastruktur Setda, serta Kabid Kominfo Dishubkominfo diketahui bahwa perencanaan *e-gov* di Kabupaten Kep. Talaud belum ada. Proses perencanaan *e-gov* yang akan dibuat dalam bentuk *masterplan e-gov* Kabupaten Kep.

Talaud saat ini baru mencapai tahap perencanaan pengembangan infrastruktur TIK sebagai bagian dari *e-gov*. Perencanaan tersebut telah dituangkan dalam rencana strategis (renstra) Dishubkominfo Kabupaten Kep. Talaud tahun 2014-2019 sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 di tingkat SKPD. Adapun perencanaan *e-gov* telah melalui tahap diskusi bersama antara BAPPEDA, Dishubkominfo, dan Bagian Pembangunan dan Infrastruktur Setda Kabupaten Kep. Talaud. Masa transisi dari RPJMD 2009 – 2014 ke 2014 – 2019 sebagai tindak lanjut hasil pemilihan kepala daerah (bupati) baru merupakan momentum yang dapat digunakan untuk merekomendasikan penyusunan rencana implementasi *e-gov*. Pada kenyataannya di lapangan, momentum ini dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah sebagai langkah awal. Buktinya adalah dalam penyusunan RPJMD yang baru, isu pengembangan sarana dan prasarana TIK sebagai induk dari implementasi *e-gov* telah terdaftar sebagai salah satu fokus pembahasan.

Manajemen Sistem

Hasil wawancara menginformasikan bahwa dari aspek belanja, minimnya anggaran menjadi faktor penghambat utama dalam mengimplementasikan pembangunan dan pengembangan *e-gov*, secara khusus, dan sarana serta prasarana TIK secara umum. Kabid Kominfo Dishubkominfo menambahkan bahwa 2013, anggaran untuk TIK Dishubkominfo sebagai penanggung jawab utama pembangunan TIK di Kabupaten Kep. Talaud hanya memungkinkan untuk pengembangan dan pembangunan *e-gov* direalisasikan secara bertahap dan bukan dalam tempo yang singkat, termasuk penyusunan *masterplan* atau *grand design*. Sebagai contoh, dari 33 SKPD Kabupaten Kep. Talaud, tidak semuanya menganggarkan sewa jaringan internet yang merupakan salah satu kunci implementasi *e-gov*. Melalui wawancara dengan Kabid Programnya, diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Capil baru akan menganggarkan sewa jaringan dan pengadaan infrastruktur TIK untuk mendukung *e-gov* di tahun 2015. Penganggaran ini dilakukan secara internal dan belum mengacu pada kerjasama dengan Dishubkominfo. Lain halnya dengan Bagian Humas Setda Kabupaten Kep. Talaud yang belum menganggarkan sarana dan prasarana untuk implementasi *e-gov*, kecuali pengembangan SDM TIK. Kedepannya, penganggaran beberapa belanja TIK seperti koneksi Internet akan dilakukan

secara terintegrasi dan terstruktur melalui satu pintu. Selain anggaran pemerintah daerah, pengembangan sarana dan prasarana TIK di Kabupaten Kep. Talaud juga mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat, misalnya bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam bentuk *Media Centre* yang saat penelitian sedang dalam proses pengadaan.

Pembangunan dan pengembangan *e-gov* secara khusus dan TIK secara umum di Kabupaten Kep. Talaud diserahkan kepada Dishubkominfo Kabupaten Kep. Talaud dengan bantuan dari BAPPEDA dalam pembuatan *masterplan*-nya. Dalam kasus ini, *mindset* pemimpin SKPD harus diarahkan pada fokus yang sama yaitu pembangunan dan pengembangan implementasi *e-gov* (*e-leadership*). Ego sektoral perlu dihilangkan untuk mewujudkan *e-gov* yang solid, terintegrasi, dan terstruktur. Minimnya penganggaran untuk implementasi *e-gov* menunjukkan bahwa *mindset* pemimpin SKPD belum menempatkan implementasi *e-gov* sebagai hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu kekuatan pembangunan dan pengembangan *e-gov* ke depannya adalah dukungan dari kepala daerah yang baru. Bupati baru saat ini dipandang memiliki visi dan misi untuk menguatkan keterlibatan TIK dalam pembangunan dan pengembangan Kabupaten Kep. Talaud (*e-leadership*). Aksi nyata ditunjukkan dengan instruksi untuk menyegerakan penggunaan *media centre* dan penambahan infrastruktur TIK di Kabupaten Kep. Talaud.

Hasil wawancara dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian BAPPEDA dari aspek manajemen SDM, menunjukkan bahwa saat ini program dan pemanfaatan anggaran bidang kominfo dari pemerintah daerah maupun pusat mayoritas difokuskan pada pembangunan infrastruktur belum kepada pembangunan SDM. Data Dishubkominfo Kabupaten Kep. Talaud menunjukkan bahwa masyarakat melek TIK di Kabupaten Kep. Talaud, 70% usia 45 ke bawah, 20% usia 45-55 tahun, dan 10% di atas 55 tahun. Persentase usia 45 ke bawah mayoritas dari kalangan siswa SMP – SMA dan ada pula aparatur pemerintah daerah. Meski belum menjadi fokus utama, upaya pembangunan SDM sudah mulai dilakukan. Namun, program tersebut masih terkonsentrasi pada peningkatan literasi TIK secara umum seperti pelatihan radio dan belum dikhususkan pada literasi TIK dalam kaitannya dengan implementasi *e-gov*. Dinas Kependudukan dan

Capil juga pernah memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan operator e-KTP. Pengkaderan operator diagendakan untuk menjamin keberlangsungan proses pengoperasian sistem. Dalam perencanaan Bagian Humas Setda Kabupaten Kep. Talaud, akan direkrut tenaga-tenaga non-PNS untuk menangani *website* yang sedang dalam proses pengaktifan kembali. Ini menunjukkan bahwa SDM aparatur pemerintahan di Kabupaten Kep. Talaud, khususnya Bagian Humas Setda masih kurang. Pelatihan terkait TIK di lingkungan aparatur Setda Kabupaten Kep. Talaud belum pernah sama sekali. Secara umum, aparatur pemerintahan Kabupaten Kep. Talaud berada pada e-literasi level 2 yaitu individu telah berkali-kali menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu aktivitasnya sehari-hari dan telah memiliki pola keberulangan dalam penggunaannya. Untuk dapat mengimplementasikan *e-gov* secara profesional, SDM perlu dibina sehingga berada pada e-literasi level 4 dimana individu telah sanggup meningkatkan secara signifikan (dapat dinyatakan secara kuantitatif) kinerja aktivitas kehidupannya sehari-hari melalui pemanfaatan informasi dan teknologi (Harahap, 2010: 135-136).

Realisasi dan Pengoperasian Sistem

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK dalam rangka manifestasi *e-gov* sudah mulai diimplementasikan di beberapa SKPD secara sektoral, meskipun belum ada regulasi atau *masterplan* yang jelas, salah satunya adalah *website*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Humas Setda Kabupaten Kep. Talaud, diketahui bahwa beberapa tahun yang lalu, Pemerintah Kabupaten Kep. Talaud juga memiliki *website*. Namun, saat ini *website* tersebut sudah tidak aktif karena tidak adanya operator yang dapat mengelola. Tidak tersedianya media yang dapat mengakomodir diseminasi informasi program pemerintah, membuat mereka menjalin kerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) dan Manado Post sebagai corong informasi. Pesan dikirim secara manual via layanan teks. Salah satu kendala metode ini adalah proses hak jawab yang biasa dilakukan melalui media cetak terhambat atau tidak *real time* karena proses pengiriman berita terlambat dan sebagainya. Jika saja *website* Bagian Humas Setda aktif, proses diseminasi informasi dapat lebih sederhana dan cepat. Kabag Pembangunan dan Infrastruktur Setda menambahkan bahwa dalam

perencanaan *e-gov* ke depan, pemerintah Kabupaten Kep. Talaud sudah mengajukan permohonan domain ke Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) sebagai langkah awal aktivasi kembali *website* tersebut. Perencanaan pembangunan *website* yang sedang dilakukan telah melalui proses analisis kebutuhan untuk memprediksi kebutuhan-kebutuhan layanan.

Hasil wawancara dengan Kabid Pendataan dan Penetapan DPPKAD serta Kabag Pembangunan dan Infrastruktur Setda juga memberikan informasi bahwa beberapa tahun yang lalu dalam pengelolaan keuangan ada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dikoordinir oleh DPPKAD. Sistem ini memungkinkan proses penyelenggaraan keuangan daerah yang berdasar pada Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi lebih akuntabel karena sudah terkomputerisasi. Kondisi yang sama dengan realisasi *website* juga terjadi pada pengelolaan SIMDA, dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, implementasi SIMDA terhenti karena tidak adanya SDM yang dapat mengelola. DPPKAD juga memiliki Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) yang petugasnya belum ada. Kondisi ini menyebabkan pengambilan data objek pajak dilakukan secara manual di masing-masing kecamatan sehingga dibutuhkan waktu yang panjang untuk dapat merampungkannya. Kabag Pembangunan dan Infrastruktur Setda menambahkan implementasi *e-gov* yang masih berjalan pelaksanaannya adalah Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) atau *e-procurement* yang dilaksanakan oleh Setda. Dinas Kependudukan dan Capil juga menjalankan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang memungkinkan *database* e-KTP terhubung ke Kementerian Dalam Negeri. Selain menggunakan dukungan Internet via *Very Small Aperture Antenna* (VSAT), pengoperasian aplikasi ini juga menggunakan jaringan *provider* lokal di Kabupaten Kep. Talaud. Jaringan ini seharusnya terhubung dengan kecamatan lain di Kabupaten Kep. Talaud untuk memudahkan proses integrasi data. Ketersediaan dan kondisi jaringan sangat mempengaruhi kinerja aplikasi ini. Kendala yang muncul adalah kualitas jaringan yang tidak memadai. Putusnya jaringan internet sering berdampak pada *offline*-nya komunikasi dengan pemerintahan pusat maupun pemerintah kecamatan sehingga rentan terjadi

masalah pada *database* seperti duplikasi data atau kehilangan data saat pengiriman secara manual.

Selain Dinas Kependudukan dan Capil serta DPPKAD, beberapa SKPD saat ini telah memiliki infrastruktur TIK dasar untuk mengimplementasikan *e-gov* seperti jaringan internet. Kekurangannya, pembangunan jaringan tersebut tidak melalui koordinasi dengan Dishubkominfo sebagai pengemban tugas dalam pembangunan dan pengembangan TIK dan *e-gov* di Kabupaten Kep. Talaud. Saat ini, pasokan *bandwidth* jaringan internet di Kabupaten Kep. Talaud hanya ditangani oleh satu *provider* internet. Hasil wawancara dengan CV. Porodisa Net menunjukkan bahwa sebanyak 20 SKPD menyewa *bandwidth* dengan kapasitas berbeda-beda secara terpisah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Keterbatasan penyedia secara langsung berpengaruh terhadap ketersediaan *bandwidth* yang dapat digunakan di masing-masing SKPD. Pengembangan dan manajemen jaringan internet secara parsial atau sektoral sejatinya akan berdampak pada pemborosan sumber daya misalnya anggaran dan *bandwidth*. Kondisi ini berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan *bandwidth* jaringan Internet di beberapa SKPD dikarenakan monopoli. *Provider* Internet tersebut juga menambahkan informasi bahwa minat penggunaan jaringan Internet sangat tinggi namun karena sumber daya yang terbatas beberapa permintaan ditolak karena trafik jaringan yang sudah padat.

Selain pembangunan jaringan yang parsial, *database* pemerintahan juga masih tersimpan secara parsial di masing-masing SKPD. Jika ditelaah, *database* pemerintahan dapat digunakan oleh banyak SKPD, misalnya data kependudukan yang selain dapat digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Capil juga dapat digunakan oleh BAPPEDA, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, atau Dinas Kesehatan Kabupaten Kep. Talaud. *Sharing database* selama ini masih dilakukan secara manual (datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Capil). Pelaporan *database* juga masih manual. Saat ini pelaksanaan *sharing database* masih mungkin dilakukan karena lokasi SKPD Kabupaten Kep. Talaud berdekatan (berada dalam satu kompleks perkantoran) sehingga dapat dijangkau dengan mudah tanpa perlu mengeluarkan anggaran yang besar. Kekurangannya, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengimplementasikannya karena harus berpindah dari satu SKPD ke SKPD lain. Pembangunan dan

pengembangan infrastruktur *e-gov* yang terintegrasi dan terstruktur dengan baik merupakan kunci implementasi *e-gov* yang lebih baik. Jika rencana belanja TIK satu jalur (*one window*) terealisasi, *website* Kabupaten Kep. Talaud akan dapat diaktifkan kembali dan dimaksimalkan fungsinya. Konsep G2G akan dapat diakomodir melalui portal yang terintegrasi dengan semua SKPD. Manajemen *bandwidth* juga dimungkinkan sehingga kebutuhan semua SKPD dapat terpenuhi. Satu hal yang menarik dalam realisasi dan pengoperasian sistem *e-gov* di Kabupaten Kep. Talaud adalah keinginan besar satu-satunya *provider* internet di daerah ini untuk ikut terlibat dalam pembangunan *e-gov*. Namun, penawaran *win-win-solution* yang pernah diajukan oleh *provider* tersebut ternyata tidak direspon dengan baik oleh birokrasi terdahulu. Memanfaatkan momentum kepemimpinan baru, proposal ini akan kembali diajukan dan diharapkan dapat mendapat respon yang lebih baik dari pemimpin yang baru.

Pemeliharaan Sistem

Data hasil wawancara dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian BAPPEDA, Kabag Pembangunan dan Infrastruktur Setda, serta Kabid Pendataan dan Penetapan DPPKAD menunjukkan bahwa pemeliharaan sistem pendukung implementasi *e-gov* masih bersifat sektoral atau terpisah. Dalam rangka memelihara keberlangsungan konektivitas antara SKPD dengan pemerintah pusat dan SKPD dengan SKPD lainnya, beberapa SKPD telah merencanakan anggaran pemeliharaan sistem pendukung *e-gov*. Dinas Kependudukan dan Capil telah memasukkan program pemeliharaan sarana dan prasarana TIK dalam anggaran tahun 2015. Penganggaran ini sangat vital untuk meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Kep. Talaud. Beberapa SKPD juga bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu penyelenggaran jasa internet (*provider*) yang juga menyediakan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana TIK, serta jasa lainnya. Salah satu bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemeliharaan sarana dan prasarana TIK adalah kegiatan rutin *scan antivirus* seminggu sekali dan perawatan lainnya di DPPKAD. Perawatan ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan proses *e-gov* di SKPD tersebut, terlebih lagi menjaga *database* keuangan yang menjadi salah satu tugas penting instansi tersebut. Keterlibatan pihak ketiga dalam pemeliharaan sistem memerlukan pengawasan ketat dari SKPD yang

dilayani mengingat penanganan sistem oleh pihak ketiga rentan akan terjadinya kebocoran data. Karenanya, dalam pemeliharaan sistem, ketersediaan SDM kompeten di internal masing-masing SKPD adalah penting. SDM inilah yang akan bertanggung jawab menangani masalah yang terjadi dalam sistem *e-gov* SKPD-nya. Pemeliharaan sistem melalui penyediaan SDM yang kompeten sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sistem *e-gov*. Bagian Humas Setda Kabupaten Kep. Talaud misalnya, berencana merangkul aparatur SKPD untuk mengelola *website* yang tentunya dapat memperkuat proses *e-gov* terutama diseminasi program pemerintahan.

Monitoring dan Evaluasi

Beberapa SKPD telah memiliki agenda monitoring dan evaluasi sendiri atas penggunaan dan pemanfaatan TIK di organisasinya. Kabag Pembangunan dan Infrastruktur Setda memberikan informasi bahwa Bagian Infrastruktur dan Pembangunan Setda memiliki agenda evaluasi TIK di lingkungannya secara manual. Hasil evaluasi biasanya diserahkan langsung kepada Dishubkominfo sebagai referensi monitoring dan evaluasi TIK di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kep. Talaud. Hasil monitoring dan evaluasi diharapkan dapat digunakan sebagai data dalam merumuskan program bidang TIK seperti penganggaran belanja infrastruktur, SDM, maupun bantuan TIK lainnya. Dalam menangani proses ini, Balitbangda dapat dilibatkan. Pelaksana tunggal perlu ditetapkan untuk menjamin standar penilaian monitoring dan evaluasi yang sama di masing-masing SKPD.

Kurangnya SDM yang berkompeten dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi di Kabupaten Kep. Talaud menjadi hambatan tersendiri. Menurut Kabid Kominfo Dishubkominfo, *stakeholder* seperti Relawan TIK Kabupaten Kep. Talaud dalam perencanaan ke depan akan dilibatkan dalam tugas ini dan diharapkan dapat membantu proses monitoring dan evaluasi secara menyeluruh di Kabupaten Kep. Talaud.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi G2G *E-Government* di Kabupaten Kepulauan Talaud

TIK mengintegrasikan sumber daya *e-gov* seperti organisasi, proses, dan SDM. Riwayat inisiasi *e-gov* menunjukkan bahwa hambatan utama implementasinya adalah kurangnya kepemimpinan

dalam kelembagaan TIK. Kemampuan itu diperlukan untuk memanfaatkan TIK sebagai strategi pembangunan. Menurut Kearney (1990), suksesnya implementasi *e-gov* ditunjang enam kunci yaitu dukungan manajemen level atas, kualitas staf TIK, kualitas pengguna, kerjasama antara TIK dan pengguna, pelatihan, dan aplikasi yang sesuai kebutuhan. Adapun Heeks dan Schware menyatakan bahwa kegagalan implementasi *e-gov* di banyak negara adalah karena mekanisme organisasi yang tidak solid. Meski organisasi menentukan strategi implementasi *e-gov*, namun hanya diposisikan sebagai faktor tambahan (Harimurti, 2010: 86). Secara lebih spesifik, Rubino-Hallman dan Hanna (2006) menekankan bahwa implementasi *e-gov* adalah sebuah transformasi besar dan melatih perubahan manajemen. Karenanya keberadaan pemimpin yang kompeten dalam memberdayakan organisasi untuk mengatasi hambatan dalam proses dan perubahan organisasi. Isu yang berkembang di masyarakat adalah bahwa daerah perbatasan saat ini menjadi fokus pemerintah pusat dan menjadi perhatian berbagai pihak (Faozan, 2006: 23). Namun dalam kenyataannya, jumlah bantuan yang mengalir ke Kabupaten Kep. Talaud sebagai salah satu daerah perbatasan masih sangat minim. Oleh karena itu, pembangunan *e-gov* tidak dapat lagi disandarkan pada bantuan pemerintah pusat tetapi harus atas inisiasi pemegang kekuasaan tertinggi pemerintah daerah (bupati). Fukuyama (2004) menyatakan bahwa kekurangan visi dan kemampuan kepemimpinan serta organisasi merupakan potret pengembangan *e-gov* di negara tertinggal.

Menanggapi pentingnya kepemimpinan dalam implementasi *e-gov*, hasil wawancara menunjukkan bahwa di Kabupaten Kep. Talaud dukungan manajemen level atas merupakan kunci utama dalam implementasi *e-gov*. Komitmen bupati yang baru dilantik dan Dishubkominfo sebagai pengemban tugas pembangunan dan pengembangan di Kabupaten Kep. Talaud cukup kuat untuk dapat mendorong implementasi *e-gov* di daerah ini. Aksi nyata komitmen tersebut sudah dapat dilihat melalui tanggapan terhadap isu pengembangan TIK sebagai kunci implementasi *e-gov* yang dibahas sebagai bagian dari RPJMD baru. *Mindset e-leadership* bupati ini diharapkan dapat menular kepada seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kep. Talaud sehingga manifestasi *e-gov*

yang terintegrasi dan terstruktur dapat dipercepat realisasinya.

Percepatan implementasi *e-gov* dari aspek lain juga dapat dipengaruhi oleh pembangunan jaringan TIK, seperti jaringan internet. Secara umum, faktor yang dapat mendukung pembangunan jaringan internet adalah kondisi geografis daerah. Wilayah daratan Kabupaten Kep. Talaud sebagian memiliki struktur geografis daerah berbukit. Dalam kondisi ini, konfigurasi jaringan internet harus dibuat sedemikian rupa agar dapat meng-*cover* dan menghubungkan SKPD. Kaitannya dengan *e-government*, keterhubungan jaringan internet antar-SKPD adalah infrastruktur yang vital untuk dipenuhi. Di Kabupaten Kep. Talaud, perkantoran hampir semuanya berada dalam satu kompleks perkantoran. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan G2G, konfigurasi ini memberikan kemudahan dalam mengakses SKPD – SKPD tersebut. Meski demikian, faktor waktu menjadi kendala dalam implementasinya. Lokasi perkantoran yang berdekatan ini dapat sangat menunjang pembangunan jaringan internet untuk keperluan implementasi *e-gov*. Topologi yang lebih sederhana dan kebutuhan anggaran yang lebih kecil untuk bahan pembangunan jaringan internet adalah dimungkinkan.

Lebih lanjut, sistem jaringan TIK, termasuk internet yang saat ini dibangun secara parsial atau sektoral oleh masing-masing SKPD dapat menjadi salah satu aspek pendukung percepatan pembangunan jaringan TIK, termasuk internet. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa jaringan internet maupun TIK secara umum di masing-masing SKPD masih sederhana (belum kompleks). Kondisi ini dipandang dapat memudahkan proses rekonfigurasi untuk mengintegrasikan jaringan TIK dan internet yang lebih terstruktur di SKPD-SKPD dalam kaitannya dengan implementasi *e-government*.

Adapun lima hambatan implementasi *e-gov* menurut Kearney (1990) yaitu kualitas pengguna, ketersediaan kemampuan TIK, kejelasan pendefinisian kebutuhan, aplikasi yang sesuai kebutuhan, dan kesadaran manajerial. Kualitas SDM sebagai operator *e-gov* di Kabupaten Kep. Talaud muncul sebagai salah satu masalah dalam implementasi *e-gov*. Hasil wawancara menginformasikan bahwa beberapa penggunaan aplikasi sistem dalam tataran *e-gov* banyak yang terhenti dikarenakan tidak adanya SDM yang menanganinya. Kualitas SDM hakikatnya dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki.

Kompetensi dapat dibagi dua kategori yaitu “*threshold*” dan “*differentiating*” menurut kriteria yang digunakan untuk memprediksi kinerja suatu pekerjaan (Spencer & Spencer, 1993: 15). *Threshold competencies* adalah karakteristik utama yang biasanya berupa pengetahuan atau keahlian dasar seperti kemampuan untuk membaca yang harus dimiliki seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya. Tetapi tidak digunakan untuk menentukan apakah seseorang tersebut berkinerja tinggi atau tidak. Sedangkan *differentiating competencies* adalah faktor yang membedakan individu yang berkinerja tinggi dan rendah (Fogg, 2004: 27). Aparatur pemerintah Kabupaten Kep. Talaud secara umum mayoritas hanya memiliki *threshold competencies*. Kompetensi ini dapat ditingkatkan melalui pelatihan atau bimbingan teknis.

Selain kualitas SDM yang masih rendah, terkotak-kotaknya pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK, termasuk Internet, juga menjadi hambatan dalam implementasi *e-gov* di Kabupaten Kep. Talaud. Mutu pelayanan yang efektif, efisien, dan terbuka dapat terpenuhi dengan baik jika implementasi *e-gov* berbasis pada sistem jaringan TIK yang terintegrasi dan terstruktur. Pengelolaan teknologi secara terintegrasi dan lintas sektoral dimaksudkan untuk dapat menyederhanakan proses bisnis dalam lingkup pemerintahan yang mutlak diperlukan mengingat beragamnya fungsi-fungsi pemerintahan yang kompleks, lintas sektoral, dan saling ketergantungan satu sama lain. Tujuan akhir dengan adanya pengelolaan teknologi adalah untuk dapat menjamin tidak ada duplikasi data, mudah dalam pengelolaannya, *cost effective* secara keseluruhan, aman, dan mudah dikembangkan lebih lanjut (Pemerintah Kabupaten Demak, 2010: 137-138). Implementasi secara parsial pada umumnya terkait dengan ego sektoral SKPD. Hambatan ini perlu diminimalkan agar implementasi *e-gov* di Kabupaten Kep. Talaud dapat lebih baik. Pembangunan jaringan TIK secara parsial juga berdampak pada mahalnya biaya yang digunakan untuk implementasi *e-gov*. Padahal pelaksanaannya dapat dilakukan secara terkoordinir, terencana sesuai dengan kebutuhan, dan hasilnya pun dapat lebih baik (Sudarto, 2005).

Infrastruktur TIK di daerah perbatasan, merupakan suatu keharusan dan menjadi kebutuhan yang sangat vital. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah kemudian berdampak pada tidak merata dan maksimalnya program peningkatan infrastruktur TIK

terutama di pulau-pulau perbatasan (Kenda, 2013: 29). Ketersediaan infrastruktur TIK di Kabupaten Kep. Talaud masih sangat minim. Per tahun 2013, hanya terdapat 126 sambungan telepon (BPS Kabupaten Kepulauan Talaud, 2013: 249-250) dan 21 BTS (Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud, 2013: 3). Realisasi isu upaya pemerintah pusat untuk memfokuskan programnya ke daerah perbatasan seperti Kabupaten Kep. Talaud belum dapat dilihat secara nyata. Bantuan dari pemerintah pusat masih tergolong minim. Perhatian yang diberikan ke daerah-daerah perbatasan seperti Kabupaten Kep. Talaud ini pun masih belum terasa dampaknya. Dari sisi swasta, kondisi geografis yang sulit menjadi pertimbangan sulit bagi pihak swasta untuk menginvestasikan infrastruktur TIK di daerah ini.

Selain infrastruktur yang belum memadai, pembangunan jaringan internet juga menjadi masalah tersendiri. Jaringan internet di daerah ini masih terbatas dimana hanya disediakan oleh satu *provider*. Banyaknya permintaan penggunaan jaringan Internet tidak dapat diakomodir secara keseluruhan. Keterbatasan ini menyebabkan minimnya kualitas jaringan internet yang dapat didistribusikan ke masing-masing SKPD. Isu pembangunan jaringan Palapa Ring oleh Kemkominfo telah lama menjadi angin segar bagi pengembangan jaringan internet di Kabupaten Kep. Talaud. Namun, sampai sekarang isu ini belum terealisasi. Dampaknya, *provider* Internet di daerah ini harus berupaya untuk mengembangkan layanan internet agar dapat memenuhi kebutuhan implementasi *e-gov*. Kendala yang kemudian muncul adalah dari sisi biaya pengadaan infrastruktur. Kondisi geografis Kabupaten Kep. Talaud yang terdiri dari pulau-pulau dan jauh dari ibukota provinsi membutuhkan pendanaan yang relatif tinggi untuk pengembangan jaringan internet. Jaringan internet yang ada saat ini disuplai (*trace root*) melalui jalur Singapura yang dilegalkan oleh pemerintah. Jika dianalisis dari letak geografis, *trace root* melalui Filipina dapat menjadi solusi karena akses atau jarak tempuh lebih pendek dibandingkan *trace root* melalui Singapura. Namun, regulasi di Indoensia belum memungkinkan untuk menempuh jalur tersebut.

Model Implementasi untuk G2G *E-Government* Kabupaten Kepulauan Talaud

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengembangan *e-gov* di Kabupaten Kep. Talaud masih berada pada tingkat 1 yaitu Persiapan yang ditandai dengan pembuatan situs informasi tidak hanya oleh Humas Sekda tetapi juga di masing-masing SKPD lainnya. Kondisi *e-gov* Kabupaten Kep. Talaud yang masih berada pada tahap persiapan juga dibuktikan dengan proses penyiapan SDM dan sarana akses *e-gov* baik internal SKPD maupun antar-SKPD. Dalam proses persiapan ini, perlu ditetapkan model implementasi *e-gov* yang dapat diterapkan di Kabupaten Kep. Talaud. Menurut Layne (2001) fase tertinggi dari perkembangan *e-gov* adalah horizontal *integration* yaitu pemanfaatan TIK oleh pemerintah dimana sebuah sistem telah terintegrasi dengan baik meskipun berjalan pada fungsi yang berlainan. Fase tersebut memunculkan model *e-gov* terintegrasi yang lebih dikenal dengan *connected government*. *Connected government* atau pemerintahan yang terkoneksi merupakan sebuah mekanisme kerja baru dalam *New Public Management* dan budaya baru dalam *Public Policy Studi*. *Connected government* adalah sebuah inisiatif yang telah diluncurkan sejak 2007 untuk memacu penyebaran informasi, integrasi, dan interoperabilitas di antara instansi pemerintah, serta memperkuat, dan menyatukan semua infrastruktur TIK. Mekanisme ini merubah cara kerja birokrat dengan mentransformasikan cara kerja komputer atau TIK, dimana konektivitas, efisiensi, transparansi, dan *sharing* informasi menjadi prinsip dasar pemerintahan yang terkoneksi. PBB dalam *Survei E-gov Global* periode 2008 menggunakan kriteria *connected government* sebagai indikator EGDI. Implementasi *connected government* masing-masing negara maupun daerah berbeda sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemerintah setempat (Harimurti, 2010: 85).

Connected government juga diterapkan dalam strategi baru *e-gov* Swiss. Dalam implementasinya, Swiss membentuk badan umum untuk mengkoordinasikan seluruh kebijakan yang dibuat. Model ini juga diterapkan Portugal dalam sebuah strategi yaitu *simpleks programme*. Melalui Jaringan Informasi Lingkungan (EIN), Ghana menghubungkan *database Environmental Protection Agency* (EPA) dengan Lembaga Penelitian Kehutanan Ghana (FORIG). Akses ini berdampak pada pengurangan

biaya perjalanan dan kualitas data yang lebih baik untuk digunakan dalam pengambilan keputusan (Harimurti, 2010, hal. 90-94). Kota Surabaya memiliki *Government Resources Management System* (GRMS) yaitu sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan terintegrasi dalam konteks belanja yang dikembangkan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini terdiri dari *e-budgeting*, *e-project planning*, *e-procurement*, *e-delivery*, *e-controlling*, dan *e-performance*. Kabupaten Jembrana menggunakan sistem perkantoran elektronik Kantor Maya (Kantaya). Adapun Kabupaten Sragen memiliki Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sebagai bentuk implementasi model *connected government* (Junaidi, 2011:92-93).

Berdasarkan beberapa model *best practise* tersebut, sebagai langkah awal, model penerapan *connected government* dalam implementasi *e-gov* di Kabupaten Kep. Talaud yang dapat diusulkan untuk diadaptasi antara lain dalam bentuk pengintegrasian *database* pemerintahan seperti kependudukan atau kepegawaian, *e-budgeting* untuk megakomodir perencanaan keuangan dan *e-project planning* untuk perencanaan pembangunan, dan sistem perkantoran elektronik seperti Kanyata. Adapun *e-budgeting* dan *e-project planning* perlu dilakukan satu jalur (*one window*) dalam rangka mencegah duplikasi program serta menjalin keterhubungan *budgeting* dan perencanaan pembangunan antar-SKPD, misalnya *budgeting* dan perencanaan pembangunan infrastruktur TIK sebagai pendukung implementasi *e-government*.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi *e-gov* di daerah perbatasan Kabupaten Kep. Talaud dalam tataran G2G masih berada pada tahap 1 yaitu persiapan meliputi pembuatan situs informasi, penyiapan SDM, dan sarana akses *e-gov* masing-masing SKPD. Pada tahap tersebut implementasi *e-gov* perlu didukung dengan komitmen kepala daerah yang diwujudkan dalam *mindset e-leadership*. Adapun faktor yang dapat menghambat implementasinya antara lain kondisi infrastruktur TIK yang masih minim di masing-masing SKPD. Terkait konsep *e-gov*, model *connected government* perlu diterapkan dalam implementasi *e-gov* di daerah perbatasan seperti Kabupaten Kep. Talaud. Model implementasi *connected e-gov* tersebut dapat

diadaptasi dalam berbagai bentuk antara lain pengintegrasian *database* pemerintahan seperti kependudukan atau kepegawaian, *e-budgeting*, *e-project planning*, dan sistem perkantoran elektronik.

Rekomendasi yang dapat disampaikan terkait implementasi G2G *e-gov* di Kabupaten Kep. Talaud secara khusus dan daerah perbatasan secara umum antara lain pemerintah daerah Kabupaten Kep. Talaud perlu membuka peluang dan mengakomodir kerjasama yang lebih luas dengan pihak ketiga seperti *provider* Internet untuk mempercepat implementasi *e-gov* di Kabupaten Kep. Talaud. SDM yang menangani proses implementasi *e-gov* di Kabupaten Kep. Talaud seperti pengoperasian, pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi sistem harus memiliki *differentiating competencies* demi menjaga keberlangsungan proses implementasi *e-gov*. Realisasi program pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur TIK di wilayah perbatasan seperti Palapa Ring harus disegerakan. Kemkominfo sebagai *leading sector* bidang kominfo perlu merumuskan kebijakan pembangunan jaringan TIK untuk kasus khusus/tertentu, misalnya *trace root* di daerah perbatasan. Fokus investasi pihak swasta terutama yang menyediakan infrastruktur TIK perlu didorong untuk mengarah kepada daerah perbatasan. Direktorat *e-gov* Dirjen APTIKA Kemkominfo perlu melakukan monitoring dan evaluasi rutin implementasi *e-gov* di daerah perbatasan dalam rangka mempercepat pemerataan implementasi *e-gov* di Indonesia. Perlu adanya penelitian yang mengkaji model implementasi G2C *e-gov* yang dapat diterapkan di daerah perbatasan, seperti model *local government* atau *open government data*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada berbagai pihak antara lain pejabat di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Kep. Talaud sebagai informan, BPPKI Manado, dan Bapak Drs. N. Kenda, M. Si yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk merealisasikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2004). Kebijakan dan strategi umum pengelolaan kawasan perbatasan. Jakarta: Bappenas.
 BPS Kabupaten Kepulauan Talaud. (2012). Kepulauan Talaud dalam angka 2012. Kabupaten Kepulauan Talaud: BPS Kabupaten Kepulauan Talaud.
 BPS Kabupaten Kepulauan Talaud. (2013). Kepulauan Talaud dalam angka 2013. Kabupaten Kepulauan

- Talau, Sulawesi Utara, Indonesia: BPS Kabupaten Kepulauan Talau.
- Damayanti, A., & Hamzah, A. (2010). Pengaruh e-procurement terhadap good governance. Madura. Diambil kembali dari <http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Pengaruh-E-Procurement-Terhadap-Good-Governance-Rieska.M.pdf>
- Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talau. (2013). Data sarana dan prasarana telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Talau. Kabupaten Kepulauan Talau: Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
- Fadhli, M. (2010). Teknologi informasi mempercepat pembangunan daerah. Diambil kembali dari <http://pkp.parekraf.go.id/oldlook/attachments/11-6555-0.pdf>.
- Faozan, H. (2006). Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah sebagai agenda utama optimasi pengelolaan daerah perbatasan. *Jurnal Borneo Administrator*, 2(2), 23-35.
- Fogg, J. M. (2004). *The greatest networker in the world*. New York : The Three Rivers Press.
- Harahap, A. R. (2010). Tingkat pemahaman masyarakat terhadap aplikasi komputer dan Internet (Survey terhadap pengunjung warung Internet di 14 kota wilayah kerja BBPPKI Medan). *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*, 11(1), 127-158.
- Hariadi, D. (2011). Analisis kebijakan implementasi e-government terhadap pelayanan kependudukan dan perekonomian di Kabupaten Sragen. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Harimurti, R. M. (2010). Dinamika pengelolaan teknologi informasi pemerintahan dan model connected government sebagai solusi. *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 1(2), 85-99.
- Hermana, B. (2012). *E-Government for the people: Indonesia?* Dipetik 21 April 2014, dari <http://pena.gunadarma.ac.id/e-government-for-the-people-indonesia/>
- Jumiati, I. E. (2010). Electronic government: Suatu inovasi peningkatan manajemen publik dalam kerangka good governance. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 54-78.
- Junaidi. (2011). Dukungan e-government dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di era otonomi daerah: Kasus best practices dari sejumlah daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Otonomi Daerah* (hal. 89-98). Serang: LAB-ANE FISIB Untirta.
- Kenda, N. (2013). Pola komunikasi dalam pemenuhan kebutuhan informasi: Studi kasus pada masyarakat Melonguane Kabupaten Kepulauan Talau. Manado: BPPKI Manado.
- Manurung, K. (2011). Strategi pembangunan kawasan perbatasan. *Tabloid Diplomasi*.
- Mardhayati. (2012). Perencanaan pengembangan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di Kota Solok. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, XIII(1), 162-173.
- Pemerintah Kabupaten Demak. (2010). Rencana induk e-government Kabupaten Demak 2010-2013. Demak.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). Instruksi presiden RI nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Jakarta.
- Retnowati, E. (2012). Keterbukaan informasi publik dan good governance (Antara das sein dan das sollen). *Perspektif*, XVII(1), 54-61.
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at work*. New York: Wiley.
- Sudarto, Y. (2005). Prospek pembangunan elektronik government untuk pembangunan daerah. *e-Indonesia Initiatives*, 2005(1). Diambil kembali dari <http://www.qjournal.co.id/paper-665-prospek-pengembangan-elektronik-government-untuk-pembangunan-daerah.html>
- Sugiyono. (2012). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Waseda University. (2013). *Waseda University international e-government ranking 2013*. Tokyo: Waseda university.
- Widi, R. K. (2010). Asas metodologi penelitian: Sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian (Pertama ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yohana, N., & Yazid, T. P. (2013). Pengelolaan website pemerintahan Kota Pekanbaru untuk good governance. *Temu Alumni Ke-4 Penerima Beasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Kementerian Komunikasi dan Informatika* (hal. 3-28). Padang: Balitbang SDM Kemenkominfo